

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemenuhan Hak atas BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Lagani Coffee & Co belum dipenuhi sesuai dengan apa yang diamanatkan pada peraturan perundang – undangan. Lagani Coffee & Co berdasarkan skala jenis usaha yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial tergolong sebagai jenis usaha kecil. Berdasarkan kriteria skala jenis usaha sebagai jenis usaha kecil, maka Lagani Coffee & Co memiliki kewajiban untuk mengikut sertakan pekerjaanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Lagani Coffee & Co meskipun belum memenuhi hak atas BPJS Ketenagakerjaan, namun dengan demikian pengusaha tetap memberikan kesempatan bagi pekerja yang secara mandiri mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 tentang pemberian ruang bagi pekerja untuk dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri dalam program BPJS.

## B. Saran

Pemberian sanksi terhadap pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS dapat bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perizinan, agar dalam proses pengurusan perizinan dapat sekaligus dilakukan pembinaan dan tambahan syarat bagi pengusaha sebelum melakukan kegiatan usaha. Penambahan syarat ini berupa surat pernyataan akan mengikutsertakan para pekerjaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penambahan persyaratan ini merupakan bentuk upaya meningkatkan kesadaran para pengusaha terhadap kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumaldji F.X., 2005, *Perjanjian Kerja*, (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta.

Eko Wahyudi, dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2016, *Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN – TK)*, Jakarta

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soedijana, dkk, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Internet:**

*Badan Pusat Statistik*, Indikator Strategis Nasional, <https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019

*Iswari Anggit*, Janji Manis Jokowi Dan Kenyataan Pahit Pertumbuhan Ekonomi, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190207082403-17-54200/janji-manis-jokowi-dan-kenyataan-pahit-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Perbedaan BPJS Kesehatan Dengan BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019

*Lezetia Tobing*, Kewajiban Pengusaha Mendaftarkan Pekerja Dalam Program BPJS, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5324/kewajiban-perusahaan-mendaftarkan-pekerja-dalam-program-bpjs->, diakses pada tanggal 5 Februari 2019

*Kemdikbud*, <https://kbbi.web.id/penuh>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Besaran Iuran, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kecelakaan-kerja.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Jaminan kecelakaan kerja, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Jaminan-Kecelakaan-Kerja.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Program Jaminan Kematian, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html), diakses pada tanggal 4 Maret 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Program Jaminan Hari Tua, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html), diakses pada tanggal 4 Maret 2019

*BPJS Ketenagakerjaan*, Program Jaminan Pensiun, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Pensiun.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019

*Tri Jata Ayu Pramesti*, Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan Dalam BPJS

,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55fec6cc534da/sanksi-jika-tidak-mengikutsertakan-karyawan-dalam-bpjs-/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019

*Muchlisin Riadi*, Jenis – Jenis Restoran, <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/pengertian-jenis-dan-sistem-pelayanan-restoran.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

*Wink*, Biografi Howard Schultz, <https://www.biografiku.com/biografi-howard-schultz-kisah-inspiratif-perjuangan-pemilik-starbucks/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

*Coffindo Indonesia*, Sejarah Mula Kopi Hadir Di Indonesia, <https://kumparan.com/coffindo-indonesia/bagaimana-awal-mulanya-kopi-berasal-lalu-hadir-di-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

*Bernas*, Bisnis Warung Kopi Yang Menjanjikan Di Yogyakarta, <https://www.bernas.id/63451-bisnis-warung-kopi-di-yogyakarta-cukup-menjanjikan.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019

#### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.